

# QUO VADIS GERAKAN POLITIK ULAMA: PERUBAHAN ORIENTASI GERAKAN POLITIK ULAMA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

**Rino Sundawa Putra**

Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jl Siliwangi No. 24 Tasikmalaya  
sayodachi\_mylife@rocketmail.com

## *Abstrak*

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran dari satu fenomena perubahan orientasi gerakan politik Ulama di Kabupaten Tasikmalaya dengan asumsi bahwa perkembangan kekinian gerakan politik ulama sudah tidak lagi berbasis Ideologi keagamaan pasca Reformasi. Tulisan ini juga menyoroti sejauh mana perubahan orientasi gerakan ulama dengan memperhatikan aspek sosial, kultural ke-Islaman yang menjadi ciri khas Kabupaten Tasikmalaya. Tulisan ini berbasis pada teori mengenai tipologi pemikiran politik Islam modern dan kontemporer. Sejarah keberadaan partai Islam di Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari figur para ulama yang menjadi lokomotif berjayanya partai Islam khususnya pada masa Orde Baru dan setelah implementasi Otonomi Daerah. Dengan dimensi, ruang dan waktu yang berbeda, pasca Reformasi, kekuatan ulama pun seakan kehilangan arah ideologisnya, dan bisa dikatakan lokomotif gerakan politik ulama sudah tidak lagi membawa gerbong kepentingan, isu-isu dan kebijakan yang bernuansa ke-Islaman.

**Kata Kunci:** gerakan politik, ulama, perubahan orientasi

## *Abstract*

*This article attempts to explain and obtain a description of the phenomenon of change in orientation of the political movement of Ulama in Tasikmalaya District assumes that the development of contemporary political movement Ulama is no longer based religious ideology of the post-reform. This paper also highlights the extent to which changes the orientation of Ulama movement with attention to social, cultural Islamization all that characterizes the Tasikmalaya district. This paper is based on the theory of the typology of Islamic Political Thought of Modern and Contemporary. The history of the existence of the Islamic Party in Tasikmalaya regency can not be separated from the figure that became the locomotive berjayanya Ulama Islam party, especially during the New Order and after implemmtasi Autonomy. With Dimensions, space and time are different, post-reform, strength Ulama also seemed to lose its ideological direction, and it can be said locomotive political movement Ulama is no longer carrying carriages interests, issues and policies nuanced to Islamization.*

**Keywords:** political movement, ulama, change orientation

Sejarah berdirinya Negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pergulatan pemikiran dan gagasan-gagasan politik. Salah satu pemikiran politik yang mewarnai dinamika sejarah bangsa Indonesia adalah pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam yang dimanifestasikan lewat organisasi pergerakan dengan ideologinya menjadi peta

politik tersendiri yang pada akhir harus berujung pada sebuah konflik dalam memperebutkan kekuasaan, ideologi Negara, sistem negara dan konstitusi negara.

Ketika gerakan politik Islam gagal dalam merealisasikan gagasan-gagasannya melalui jalur politik parlemen pada masa-masa awal proklamasi kemerdekaan,

beberapa gerakan ini bermutasi menjadi gerakan perlawanan bersenjata yang berujung pada tuntutan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya sejarah mencatat peristiwa besar yang menjadi akumulasi gerakan politik Islam, yaitu peristiwa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang diproklamlirkan oleh Soekarmadji Maridjan Kartoesowirdjo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya Jawa Barat. Keberhasilan pemerintah Soekarno dalam menumpas gerakan DI/TII ini seolah menjadi sinyal berakhirnya gerakan politik Islam lewat jalur pemberontakan.

Dalam perkembangannya, konsensus mengenai pengakomodasian nilai-nilai Islam dalam konstitusi Negara tercermin dari Falsafah Pancasila dengan nilai kebhinekaan yang tertuang dalam lima sendi khususnya sila pertama, yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Falsafah Pancasila seolah menjadi obat yang mujarab dalam mengakomodasi khasanah pemikiran politik yang berkembang pasca proklamasi. Cita-cita untuk mendirikan Negara Islam harus kandas ditengah jalan.

Dalam ranah politik parlemen, gerakan politik Islam tidak surut, sebagai manifestasi yang memperjuangkan tegaknya nilai-nilai Islam. Salah satu partai dengan gagasan Islam yang paling besar adalah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dalam naungan sistem Parlementer. Walaupun pada akhirnya nasib Masyumi juga kandas ditengah jalan sebagai akibat dituduhnya elite-elite politik Masyumi ter-

libat gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Permesta).

Setelah kekuasaan Soekarno runtuh, rezim Orde Baru mencoba melakukan pendekatan dengan kalangan-kalangan Islam, salah satunya dengan merehabilitasi tokoh-tokoh Masyumi dan diperbolehkan aktif dalam politik dengan meleburkannya ke PPP. Disinilah, pola perjuangan gerakan Islam mulai mengalami perubahan, atau bisa dikatakan dipaksa berubah dan mau tidak mau harus mengakomodasikan paradigma perjuangannya sesuai dengan agenda politik Orde Baru. Ini bisa dipahami sebagai akibat menguatnya struktur dan infrastruktur politik yang dibangun oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Bahkan pada perkembangannya, di tingkat pusat gerakan perjuangan Politik Islam hanya sebatas etalase politik yang pada ujungnya terlihat sebagai politisasi gerakan politik Islam oleh rezim Orde Baru.

Ditingkat bawah, hasrat dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam lewat jalur politik parlemen tidak surut, apalagi setelah Orde Baru pada tahun 1973 melakukan penyederhanaan partai politik menjadi tiga partai (Golkar, PPP, PDIP). Secara ideologis, pembagian pemilih terbagi menjadi tiga, yakni pemilih ideologis Islam yang mewakili PPP, pemilih ideologis Pancasila yang mewakili Golkar dan pemilih ideologis nasionalis sekuler yang mewakili PDI.

Pada fase ini, pendongkrak suara PPP tidak bisa dilepaskan dari peran para tokoh Ulama yang menjadi corong gerakan politik PPP dalam meraup suara. Ulama dan

santri menjadi ujung tombak ditataran akar rumput dalam menyebarkan jargon-jargon Islam sebagai cara merebut simpati pemilih. Kehadiran tokoh-tokoh ulama dalam kancah politik praktis pada masa Orde Baru menjadi sebuah gambaran bahwa harapan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam ranah sebuah hukum Negara (syariat) masih besar. Kehadiran tokoh-tokoh Ulama yang berdiri dalam barisan PPP menjadi faktor pendukung terbesar PPP dalam setiap Pemilu, sehingga PPP memperoleh suara kedua terbesar setelah Golkar.

Kehadiran ulama dalam politik praktis pada masa Orde Baru masih didasari atas besarnya hasrat tokoh-tokoh ulama dalam mengusung cita-cita penegakan syariat Islam, sehingga bisa dikatakan keikutsertaannya dalam politik praktis sebagai manifestasi perjuangan gerakan Politik Islam yang diestafetkan kepada mereka oleh para pendahulunya. Orientasi gerakan politik ulama pada waktu itu tidak semata-mata meraih kekuasaan politik.

### **Tipologi Pemikiran Politik Islam Modern-Kontemporer**

Abudin Nata membagi pemikiran politik Islam kepada tiga tipologi yakni organik tradisional, sekular, dan moderat (Abudin Nata, 2001 : 180). Berikut adalah penjelasan tentang ketiga tipologi pemikiran politik Islam tersebut. **Pertama**, Tipologi Pemikiran Politik Islamic Organik Tradisional. Tipologi ini melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (din wa daulah). Ia merupakan agama yang

sempurna dan antara Islam dan negara merupakan dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara benar-benar organik dimana negara berdasarkan syari'ah Islam dengan ulama sebagai penasihat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai agama sempurna, bagi pemikir politik Islam yang memiliki tipologi seperti ini, Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat yang sekular, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik. Rasyid Ridha, Sayyid Qutb dan Abul Ala Al Maududi adalah beberapa sarjana yang termasuk dalam kategori pemikiran ini.

**Kedua**, Tipologi Pemikiran Politik Islam Sekuler. Kebalikan dari tipologi pertama, menurut tipologi ini Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan agama lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama murni bukan negara. Pemikir yang masuk dalam tipologi ini adalah Ali Abd al-Raziq.

**Ketiga**, Tipologi Pemikiran Politik Islam Moderat. Berbeda dengan dua kecenderungan tipologi di atas adalah tipologi ketiga yang moderat. Tipologi ini menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik, tetapi juga menolak klaim ekstrim kedua yang melihat bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut tipologi ini, kendati Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam

Islam terdapat prinsip-prinsip moral atau etika bagi kehidupan bernegara, yang untuk pelaksanaannya Umat Islam bebas memilih sistem mana pun yang terbaik. Yang termasuk tipologi ini adalah Muhammad Husein Haikal (lahir 1888), Muhammad Abduh (1862-1905), dan Fazlurrahman. Luthfi al-Sayyid.

### **Sejarah Politik Islam Indonesia**

Dalam sejarah bangsa Indonesia, gerakan politik Islam menunjukkan peranannya dalam usaha membebaskan bangsa Indonesia dari Imprealisme Eropa. Peranan politik Islam telah dilakukan jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Kelahiran Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dipelopori sekelompok kecil umat Islam pada 16 Oktober 1905 yang disusul dengan lahirnya Sarekat Islam (SI) yang berdiri pada tanggal 11 November 1912 merupakan bentuk kebangkitan bangsa terhadap kekuasaan koloni Belanda.

Pandangan Sarekat Islam mengenai politik sangat jelas, bahwa agama, politik dan ekonomi adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan (Deliar Noer : 144). Sikap politik seperti ini umum digunakan oleh para aktivis gerakan Islam dan partai politik Islam yang melihat bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif, agama yang telah lengkap dan sempurna yang mengatur kehidupan manusia.

Kekuatan politik Islam seperti Sarekat Islam memperlihatkan sikap-sikap kritis terhadap penguasa. Sikap Sarekat Islam merupakan cerminan sikap yang ber-

dasarkan kepada nilai-nilai Islam. Dominasi Saerakat Islam sebagai satu-satunya partai Islam pra-kemerdekaan. Beberapa organisasi politik yang didirikan oleh kalangan Islam sebelum kemerdekaan setelah Sarekat Islam mengambil porsi yang sangat besar dalam menegakan cita-cita ke-Islaman pada masa pra-kemerdekaan. Beberapa partai Islam yang muncul pada masa pra-kemerdekaan seperti Majelis A'ala Islam Hindia Syarqiyah (MAIHS), Persatuan Islam Indonesia (PII) merupakan benih-benih lahirnya gerakan politik Islam yang memiliki cita-cita konstitusional dalam membentuk Indonesia merdeka sebagai negara Islam.

Pada masa persiapan kemerdekaan 1945, dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dalam sidang-sidang BPUPKI, umat Islam menghendaki Indonesia yang akan terbentuk adalah negara Islam, dengan asumsi sosiologis bahwa masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim. Lobi-lobi aktivis politik Islam dalam memperjuangkan syariat Islam sebagai dasar negara adalah dinamika perjuangan politik Islam yang sejak pra-kemerdekaan telah menemukan momentumnya dan berkembang sebagai gerakan politik sampai Indonesia merdeka.

### **Politik Islam Indonesia**

Abudin Nata dalam, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia* (2001 : 193) menyebutkan sedikitnya ada dua cara

memandang Islam dan politik di Indonesia pada masa lampau dan mungkin hingga menjelang reformasi. Pertama, Islam merupakan format dan tujuan yang digunakan untuk melakukan pengaturan kehidupan bangsa dan negara secara formal, legalistik, dan menyeluruh. Ini yang mungkin kemudian disebut 'Islam politik'. Kedua, Islam merupakan salah satu komponen yang membentuk, melandasi, dan mengarahkan bangsa dan negara. Inilah yang kemudian populer disebut 'Islam kultural'. Kedua cara pandang tersebut sama-sama mengalami kesulitan untuk menempatkan peran Islam di dalam kehidupan politik riil (*real politics*) di Indonesia. Untuk menganalisa cara pandang format politik Islam Indonesia, pemikiran Maududi dan Raziq digunakan sebagai pisau analisis.

Menurut konseptualisasi Maududi, kebutuhan dan pembenaran untuk suatu negara Islam timbul dari pemahaman akan tatanan universal. Karena itu negara Islam adalah bagian dari teologi terpadu, luas, yang prinsip pokoknya adalah kedaulatan Tuhan. Negara atau alat lain yang akan melaksanakan kekuatan politik merupakan konsekuensi pada konsepsi universal yang diatur Tuhan bagi kehidupan manusia di dunia.

Untuk itu Maududi merumuskan negara Islam dengan menggunakan dua cara. Pertama, melalui pembahasan prinsip-prinsip dasar negara Islam. Kedua, melalui pertimbangan lembaga-lembaga dan sifat-sifat khususnya.

Bagi Maududi, sasaran negara bukan semata-mata mencegah tirani,

menghentikan berbagai macam kejahatan, tapi juga mendorong setiap jenis kebajikan. Guna mencapai tujuan ini diperlukan kekuatan politik, dan negara dibenarkan menggunakan seluruh sarana. Suatu negara dengan tujuan seperti itu tidak dibolehkan mengabaikan kehidupan rakyatnya, walaupun misalnya beralasan bahwa ini di luar wewenangnya. Pendekatannya, haruslah menyeluruh dan universal. Pendeknya negara haruslah totaliter. Menolak ketentuan ini, dengan membiarkan adanya bidang di luar kekuasaan negara, akan sama artinya dengan menyangkal kedaulatan Tuhan. Maududi memang mengakui bahwa konsepsi negara Islam adalah totaliter. Hanya totalitarianisme yang dikenalkan itu tidak menindas kebebasan individu dan kemerdekaan manusia tetapi justru melindunginya.

Satu hal pokok dari negara Islam, menurut Maududi adalah wujudnya sebagai suatu negara ideologi. Faktor pengikat di kalangan warga negara adalah ideologi yang dianut bersama. Ideologi ini bertujuan memperbaiki masyarakat manusia dan negara adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam definisi umum modernisasi politik terkandung tiga tema besar, yaitu, (1) Penekanan pada diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga dan struktur politik. (2) Penekanan atas persamaan, kekuasaan, gagasan bahwa perkembangan politik melibatkan partisipasi massa dalam masalah-masalah politik. (3) Penekanan pada perluasan kapasitas dari suatu sistem politik untuk mengarahkan perubahan sosial dan ekonomi.

Ketiga tema itu bergaung keras di negeri-negeri Muslim yang sedang mencari identitasnya. Dilema pun muncul di sekitar tema-tema itu. Jika diferensiasi membuat pemisahan lembaga politik dari struktur agama, maka diktum bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari agama telah dipupus. Jika agama dan lembaga-lembaganya (ulama, pemimpin agama) menjadi alat untuk membawa massa pada proses politik maka keabsahan proses politik massal itu pun dipertanyakan. Tetapi satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah, bahwa nilai-nilai agama dapat digunakan untuk membuat politik lebih berarti. Nilai-nilai keagamaan juga memberikan pengaruh penting pada kultur politik dan mempengaruhi kecenderungan individu maupun masyarakat ke arah pola-pola tertentu kehidupan politik. Karena itu dalam “negara-negara baru” agama sedang mengalami proses penafsiran kembali. Penafsiran itu berkisar pada upaya perumusan sistem politik yang tetap mempunyai etika politik dan budaya politik yang kurang lebih Islami, namun tidak muncul secara formal: memahami pluralisme.

Akhmad Satori dalam *Sketsa Pemikiran Politik Islam* (2011: 143), penafsiran kembali konsepsi Islam tentang politik dan kenegaraan muncul misalnya di Mesir dengan tokohnya Ali Abdul Raziq. Melalui buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, konsepsi Raziq kemudian menjadi model alternatif bagi pemikiran politik Islam kontemporer. Secara garis besar pemikiran Raziq bertolak dari definisinya tentang “Khalifah” (Munawir Syadzali : 137-138).

Bagi Raziq, khalifah tidak wajib didirikan, baik menurut akal maupun menurut syara’. Yang wajib bagi umat adalah menegakkan hukum syara’. Jika umat sudah berjalan di atas keadilan dan hukum-hukum Allah telah dilaksanakan, maka tidak perlu ada imam atau khalifah. Baik Alquran maupun sunnah tidak pernah menyebutkan term khalifah dalam pengertian kepemimpinan negara.

Kedua, bahwa risalah (kerasulan Muhammad SAW) itu bukanlah kerajaan. Risalah adalah suatu status kultural dan kerajaan adalah status struktural. Banyak raja yang bukan rasul, sebagaimana kebanyakan rasul adalah bukan raja. Penafsiran Raziq tentang risalah Nabi hanya mengandung nilai yang menyerupai pemerintahan politik. Raziq yakin bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul dan menyampaikan seruan agama, tidak pernah mendirikan negara dalam pengertian yang selama ini berlaku dalam ilmu politik.

Dari interpretasinya terhadap dua hal tersebut, Raziq membuat kesimpulan akhir yang sangat luwes. Khalifah tidak ada kaitannya dengan agama. Agama tidak mengenalnya, tidak mengingkari, tidak memerintahkan, dan tidak melarangnya. Semua dikembalikan kepada akal pengalaman manusia dan pendapat orang.

Dalam term mutakhir, solusi Raziq itu merupakan “de-ideologi” dan “de-politisasi” Islam dan bersamaan dengan itu terjadi perluasan wawasan keislaman. Politik hanya merupakan salah satu komponen, dan bukan determinan, di dalam proses sejarah kehidupan umat Islam.

## **Gerakan Politik Ulama di Kabupaten Tasikmalaya**

Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu wilayah sebagai pendulang suara bagi PPP. Fakta tersebut tidak mengherankan, karena Kabupaten Tasikmalaya memiliki identitas sebagai wilayah yang kental akan nilai-nilai Islam. Nuansa Islam yang menjadi identitas kabupaten Tasikmalaya tercermin dari banyaknya tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh dan berdirinya ratusan pesantren. Isu-isu penegakan nilai-nilai Islam yang disponsori oleh PPP menjadi isu yang laris di Kabupaten Tasikmalaya, hal ini kemudian ditopang dengan aktivitas politik para ulama di Kabupaten Tasikmalaya berlabel atribut PPP yang seiring sejalan dengan agenda isu penegakan nilai-nilai Islam. Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi lumbung suara bagi PPP tidak dilepaskan dari massifnya gerakan politik ulama didukung dengan kultur masyarakatnya yang religius dengan orientasi perjuangan sebagai jalan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam lingkup Negara.

Pasca Reformasi, seiring dengan diimplementasikan otonomi daerah dengan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung dan bermunculannya partai baru, termasuk partai Islam, identitas politik ulama terpecah ke beberapa partai politik. Partai politik yang menjadi ajang hijrahnya para ulama di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya PKB, PBB, PBR dan PKS. Perubahan arah politik ini tentunya berpengaruh terhadap peta politik khususnya peta politik ulama di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini

secara otomatis juga merubah pandangan politik ditingkat akar rumput.

Persaingan para ulama dalam perahu partainya masing-masing ini memunculkan sebuah fenomena baru, yaitu semakin ketatnya persaingan dalam merebut pemilih "Islam" di kabupaten Tasikmalaya dan terpecahnya kekuatan partai Islam. Yang lebih ironis lagi adalah terjadinya perubahan orientasi gerakan politik ulama kearah yang lebih pragmatis. Pada masa kekuatan politik Islam masih berada dalam satu partai PPP, gerakan politik ulama lebih didasarkan pada faktor ideologis keagamaan yang berkuat pada isu-isu ke-islaman dan berorientasi pada penerapan syariat Islam.

Faktor ideologis yang menempatkan Islam sebagai ideologi partai menempatkan PPP sebagai partai dominan yang menempati urutan terbesar di Kabupaten Tasikmalaya. Pengaruh ideologi Islam PPP tidak terlepas dari sosio-kultural masyarakat kabupaten Tasikmalaya yang religius-Islami. lahirnya ulama-ulama kharismatik yang memimpin pondok-pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, menempatkan PPP sebagai partai yang paling memikat hati masyarakat kabupaten Tasikmalaya, relasi antara sosio-kultural dan ideologi Islam dalam partai-partai Islam mempengaruhi sosio-politik di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga isu-isu keislaman yang diusung partai-partai Islam di Kabupaten Tasikmalaya menjadi isu politik yang paling banyak diminati.

Pasca Reformasi, dimana jumlah partai politik diperbanyak, situasi sosio-

politik di Kabupaten Tasikmalaya tidak banyak berubah. Partai-partai Islam masih menjadi partai dominan yang mempengaruhi isu-isu keislaman dimana ketokohan ulama menjadi lokomotif penggerak masa ditataran akar rumput. Pasca Reformasi kekuatan partai Islam terpecah menjadi dua kekuatan besar, yakni PPP dan PKB. Secara tidak langsung pecahnya kekuatan partai Islam membuat pecahnya keberpihakan politik para ulama kharismatik. Dukungan secara tradisional dan secara formal, yakni masuknya beberapa tokoh ulama menjadi elite partai politik, menambah dinamika wacana-wacana politik yang mengusung isu-isu keislaman.

populernya isu-isu dan wacana-wacana politik keislaman di Kabupaten Tasikmalaya, menempatkan posisi ulama sebagai sentral yang dapat mengumpulkan dukungan politik dari akar rumput. Peta dukungan politik yang selama dibangun di tataran akar rumput kepada ulama terutama disandarkan pada satu harapan tentang kondisi yang ideal mengenai implementasi kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai Islami dalam membangun pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Citra yang selama ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh ulama dengan kendaraan politiknya masing-masing membawa pesan dan harapan akan lahirnya nilai-nilai ideal implementasi kebijakan yang bernuansakan syariat Islam, ini direspon oleh masyarakat sebagai kendaraan dan konsolidasi kekuatan untuk menciptakan nuansa Islami yang berlandaskan nilai-nilai syariat di Kabupaten Tasikmalaya.

Ada fenomena yang berbeda khususnya pasca Reformasi, dimana kekuatan partai-partai Islam terpecah menjadi beberapa kekuatan, dan dukungan tradisional dan formal dari tokoh-tokoh ulama di Kabupaten Tasikmalaya ikut terpecah. Fenomena munculnya ketidakpercayaan masyarakat yang selama ini membangun relasi dukungan ideologis dan relasi politis kepada para ulama kharismatik yang menggerakkan kendaraan partai Islam. Ketidakpercayaan tersebut menyangkut eksistensi gerakan politik ulama yang sudah tidak konsisten memperjuangkan nilai-nilai syariat Islam dalam panggung politik. Masyarakat kini menilai bahwa gerakan politik ulama lewat masing-masing partai Islam sudah tidak memiliki militansi yang kuat terhadap komitmen keislaman di Kabupaten Tasikmalaya, walaupun masih ada hanya sebatas jargon-jargon politis untuk meraih kalangan pemilih ideologis dan tradisional. Keadaan seperti ini menempatkan partai-partai Islam sebagai partai yang dipandang tidak lagi memiliki nilai-nilai ideologis ke-Islaman. Pragmatisme peran ulama dalam politik praktis menambah kesan bahwa partai Islam secara umum hanya dipahamai sebagai alat atau kendaraan untuk menduduki jabatan-jabatan politik bagi para elite politik dari kalangan ulama tanpa adanya militansi dan komitmen yang kuat akan tegaknya nilai-nilai syariat.

Secara langsung, fenomena seperti menempatkan ulama sebagai aktor politik yang awalnya dipercaya sebagai lokomotif gerakan politik Islam di Kabupaten Tasikmalaya, menjadi aktor politik yang diang-

gap tidak memiliki visi dan misi keislaman. Gerakan politik ulama sudah dianggap sebagai gerakan politik yang tidak ideologis dan terkesan hanya mementingkan kepentingan politik pribadi dan golongan elite partai. Ada semacam perubahan orientasi gerakan politik ulama yang tadinya berorientasi ideologis menjadi berorientasi pragmatis.

Gerakan politik ulama yang dianggap kehilangan orientasi ideologis, menempatkan ulama sebagai aktor politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya kehilangan kepercayaan dari sebagian besar pemilih tradisional dan ideologis. Gerakan politik Islam yang dimotori oleh ulama telah direduksi kedalam sekat-sekat kepentingan golongan yang sudah melenceng dari orientasi ideologis, yakni implementasi ideal akan nilai-nilai syariat Islam di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari sisi elektabilitas, kondisi seperti menempatkan partai-partai Islam sebagai partai yang tidak lagi memiliki visi-misi yang kuat terhadap isu-isu, dan wacana-wacana ke-Islaman, sehingga secara langsung mempengaruhi terhadap perolehan suara. Pemilih tradisional dan ideologis kini mulai mencair dengan dua alternatif pilihan, yakni menjadi golput atau memilih partai non Islam karena berbagai faktor.

### **Arah Politik Ulama di Kabupaten Tasikmalaya**

Secara umum kita melihat gejala kekuatan politik identitas di Indonesia semakin meredup. Para tokoh politik Islam

yang basis gerakannya adalah pesantren dan tokoh ulama kini seakan perlahan-lahan melebur pada berbagai berbagai element kekuatan ideologi politik yang berbeda. Militansi gerakan politik Islam juga semakin tidak terdengar lagi geloranya. Gejala umum ini juga sangat dirasakan di Kabupaten Tasikmalaya. Gerakan politik ulama di Kabupaten Tasikmalaya dikenal pada masa Orde Baru dengan pandangan dan sikapnya yang militan, yang terstruktur bagi itu dalam gerakan sosial politik keagamaan atau dalam struktur partai (PPP). Tidak heran bila pada masa Orde baru, Kabupaten Tasikmalaya selalu menjadi lumbung suara bagi PPP.

Bila merujuk pada kategorisasi atau tipologisasi: pemikiran politik Islam yang organik tradisional, yang sekuler dan moderat, dalam Abudin Nata, MA, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia* (2001 : 180), tipologi pemikiran Islam Indonesia, penulis memetakan pada fase perkembangan gerakan politik ulama di kabupaten Tasikmalaya setidaknya melewati dua fase. Fase pertama adalah fase organik tradisional. Fase ini dimulai ketika secara tradisional Kabupaten Tasikmalaya memiliki kultur ke-Islaman yang kuat jauh sebelum Indonesia merdeka. Kita bisa melihat bagaimana militansi perjuangan KH. Zainal Mustofa di Singapura melawan pendudukan Jepang. Militansi dan sikap politik KH. Zainal Mustofa didasarkan pada *ghirah* dan semangat Jihad yang dilandasi nilai-nilai Ke-Islaman. Tahap selanjutnya, adalah munculnya gerakan DI/TII dimana

Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu basis gerakan ini. Disambutnya gerakan DI/TII di Kabupaten Tasikmalaya tidak lepas dari *ghirah* yang kuat terhadap prinsip-prinsip ke-Islaman dalam meletakkan dasar negara dalam mengkonstruksi Negara Indonesia. Dilanjutkan pada tahap Orde Baru, militansi baik secara sosial-politik atau gerakan politik struktural para ulama di Kabupaten Tasikmalaya melalui PPP begitu kuat, sehingga Kabupaten Tasikmalaya menjadi lumbung suara bagi PPP.

Pasca lengsernya Soeharto yang mengakhiri rezim Orde Baru yang secara langsung merubah format sistem politik, sistem pemilu, sistem kepartaian dan kebijakan politik yang mengatur daerah, otonomi daerah juga secara langsung merubah format politik di daerah. Situasi politik di daerah menjadi lebih dinamis, kompromi politik di daerah sudah tidak lagi ditentukan secara horizontal pada dinamika yang terjadi di tingkat pusat. Lobi, kesepakatan politik di daerah kini ditentukan oleh kepentingan-kepentingan lokal para elite di daerah. Tetapi situasi ini justru menjebak para ulama yang secara struktural menjadi elite-elite partai Islam tidak memanfaatkan situasi sebagai upaya optimalisasi gerakan militansi ke-Islaman di daerah. Para ulama kini cenderung kompromistis dan bahkan pragmatis dalam setiap manuver-manuver politiknya. Pada momentum Pilkada, gerakan politik ulama juga sering terpecah dan seolah tidak memiliki *bargaining* yang kuat dalam komitmen mendukung tokoh yang juga memiliki militansi ke-Islaman

yang kuat. Memang pasca otonomi daerah dan Pilkada langsung, dua kepala daerah yang pernah dan sedang menjabat adalah wakil Partai Islam (PPP) dan juga salah satu keluarga besar dari pesantren besar di Kabupaten Tasikmalaya yakni Pesantren Miftahul Huda, tetapi dari segi kompromi politik, kebijakan pemerintah daerah sudah tidak lagi terlihat *ghirah* ke-Islaman yang muncul, semua melebur dalam dimensi moderat. Maka dalam fase inilah gerakan politik ulama masuk pada fase moderat.

Munculnya gerakan radikal dalam *ghirah* ke-Islaman yang kuat di Kabupaten Tasikmalaya, dan ini merupakan gejala umum adalah munculnya gerakan di luar struktural Partai Politik. Munculnya FPI dan Hizbut Tahrir seolah menjadi saluran tersendiri bagi para tokoh ulama dan umat di Kabupaten Tasikmalaya yang kecewa dengan beberapa elite ulama di tubuh partai politik yang lebih moderat untuk melakukan gerakan sosial-politik diluar sistem.

### **Simpulan**

Kesimpulan dari tulisan ini adalah gerakan politik ulama telah melebur pada prinsip moderat yang sudah tidak ada lagi batas tegas antara prinsip gerakan politik ulama tradisional dengan gerakan prinsip kelompok politik yang bersifat moderat bahkan sekuler. Gerakan politik ulama di Kabupaten Tasikmalaya mengarah pada kompromi yang bersifat lebih terbuka, tidak eksklusif dan masing-masing gerbong kekuatan sosial-politik ulama memiliki gerakan yang dinamis dalam menentukan sikap politiknya.

## Daftar Pustaka

- Noer, Deliar. 1973. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Oxford University Press. Singapore.
- Nata, Abudin. 2001. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*. UI Press. Jakarta.
- Satori, akhmad. 2011. *Sketsa Pemikiran Politik Islam*. Politeia Press. Yogyakarta.
- Syaefudin, Azwar. 1997. *Realibilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Huberman, Millis. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. PT. Rosada Karya. Bandung.
- Moeleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Bogdan, Robert C. Dan Steven J. Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach in The Social Science*. Usaha Nasional. Surabaya. Alih Bahasa, Arif Furchan, Jhon Wiley dan Sons.
- Sutopo, Heribertus B. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depdikbud RI UNS. Surakarta
- Harrison, Lisa. 2009. *Metode Penelitian*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Wignosubroto, Soetandyo dkk. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Institute for Local Development. Jakarta.